



2025



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Kabupaten Natuna

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (Result Oriented Government).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (Penja) dan semua program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam dua Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana realisasi indikator ke satu "*Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri*" sebesar 235,58 % dengan capaian sebesar 690,23 % lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 34,13 %, realisasi tersebut mencakup ketersediaan pangan yang berasal dari ketersediaan Bulog, data ketersediaan pangan beredar dari Disperindak Kabupaten Natuna, CPP Daerah Kabupaten Natuna serta dari produksi pangan yang dihasilkan pada tahun 2025. Sedangkan ketersediaan pangan yang berasal dari intervensi pemerintah daerah (CPP) sebesar 29,4 % dengan capaian 86,34 %, dimana realisasi tersebut berasal dari sisa CCPD tahun sebelumnya ditambah CCPD tahun berjalan dibagi target CPPD (75 Ton) dibagi 100. Untuk realisasi indikator ke 2 yaitu "*Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan*" sebesar 14.155,81 Ton dengan capaian sebesar 9,01 % lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 157.123 Ton.

Adapun anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna sebesar Rp. 14.212.610.070,- dimana alokasi untuk mendukung indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp. 3.342.026.016,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.797.415.337,- (83,70 %) dan anggaran pendukung sebesar Rp. 10.870.584.054,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.562.211.818,- (97,16 %), Efisiensi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tahun 2025 sebesar 6 %, persentase ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah anggaran yang tersedia dengan realisasi anggaran. Sedangkan in-efisiensi anggaran pendukung IKU mencapai 16,30 %, in-efisiensi tersebut disebabkan adanya realisasi yang tidak maksimal dari satu sub kegiatan akibat tidak adanya kepastian ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, WB,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna. Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna disampaikan dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden No 29 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah digariskan dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna dan sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan perencanaan.

Kami merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, untuk itu kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian dan Kabupaten Natuna mendatang. Dan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal hendak-Nya, Aamiin.

Ranai, 9 Januari 2026

Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Natuna,



WAN SYAZALI, SKM
NIP. 19760507 200502 1 007

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Gambaran Umum Organisasi	9
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.4.2 Struktur Organisasi	11
1.5. Permasalahan dan Isu Strategis	13
1.6. Sistematisasi Penyusunan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Visi dan Misi	16
2.2. Tujuan dan Sasaran	18
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
2.4. Perjanjian Kinerja	20
2.5. Kebijakan	31
2.6. Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Analisis Kinerja	40
3.2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir	46
3.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	52
3.4. Analisis Keuangan	52
3.5. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja	58
BAB IV PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.1. Strategi	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain sebagai bahan evaluasi dan rangkaian program yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan Kinerja yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dikatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten yang membidangi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kelembagaan dan penyuluhan serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai instansi pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menkonsumsikan capaian kinerja dinas dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan

sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi penegakan hukum transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman adil dan sejahtera melalui peningkatan produksi hasil pertanian untuk menjamin akuntabilitas, perbaikan kinerja pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2025 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna Tahun 2025 – 2029.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penilaian Kinerja Organisasi.
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja melalui media Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna adalah :

- a. Terlaksananya akuntabilitas kinerja dan pengembangan manajemen kinerja organisasi perangkat daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja sehingga terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, efektif dan efisien serta bertanggungjawab.
- b. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan dan pertanian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dibidang ketahanan pangan dan pertanian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, dengan rincian sebagaiberikut:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana operasional di lingkungan dinas ketahanan pangan dan pertanian berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Merumuskan dan mengkoordinasian rencana operasional di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien
6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait ketahanan pangan dan pertanian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan urusan ketahanan pangan dan pertanian.
2. penyusunan program dan pengembangan sistem informasi urusan pangan dan pertanian.
3. koordinasi pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan dan pertanian.
4. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan.
5. pelaksanaan pengendalian, pengembangan, dan pemantapan serta pengawasan urusan pangan dan pertanian.
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Pangan dan Pertanian
7. pembinaan produksi, pengolahan dan pemasaran di hasil

pertanian.

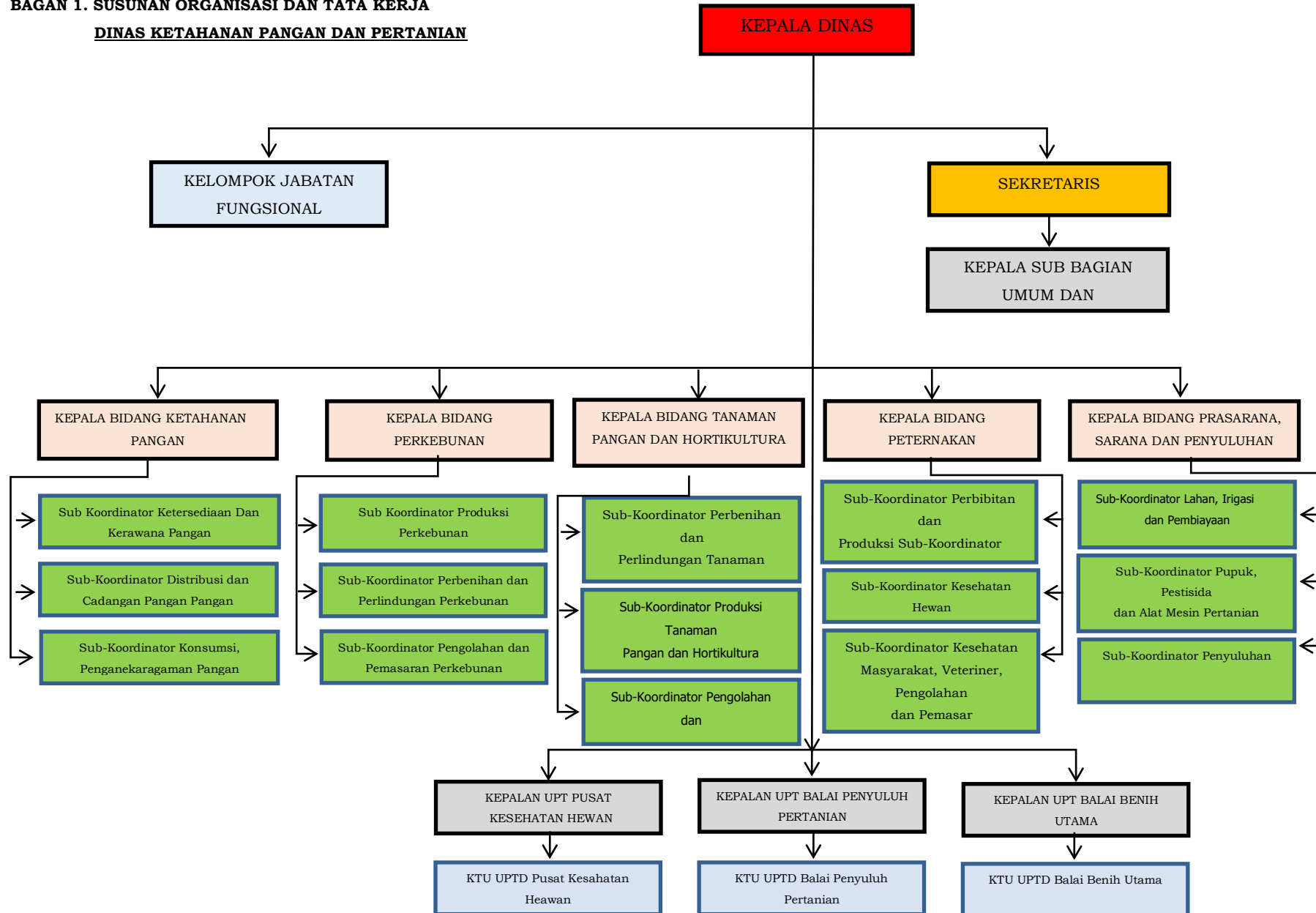
8. pemberian rekomendasi teknis urusan pangan dan pertanian.
9. pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan dan pertanian.
10. penataan dan pengawasan prasarana dan sarana pertanian.
11. pengawasan dan pengendalian urusan ketahanan pangan pertanian.
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna terdiri dari:

1. KepalaDinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perkebunan.
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
7. Bidang Ketahanan Pangan.
8. Unit Pelaksana Teknis.

BAGAN 1. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



1.5 Permasalahan Dan Isu Strategis

Permasalahan pokok dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari sisi ketahanan pangan adalah masih rentannya kerawanan pangan masyarakat. Situasi kerawanan pangan masih rentan di Kabupaten Natuna dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan dan pengaruh cuaca yang cenderung ekstrim pada saat-saat tertentu. Selain itu rendahnya produktifitas sektor pertanian menjadi permasalahan dalam upaya peningkatan produksi pertanian. Faktor penghambat rendahnya produktifitas tersebut antara lain adalah :

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan;
2. Masih kurangnya pelayanan pengobatan dan pencegahan penyakit ternak;
3. Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan kelompok petani

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut maka dirumuskan dengan mewujudkan visi Kabupaten Natuna yang mengintegrasikan seluruh komponen penyelenggaraan pemerintahan yaitu :

1. Akselerasi peningkatan kualitas SDM
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (Smart Bureaucracy)
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Natuna No. 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Latar Belakang

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan rencana strategis instansi pemerintah yang jelas dan sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), tantangan/kendala (*threats*) yang ada, agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja OPD.

2.1. Visi dan Misi

Visi dan Misi yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 yaitu:

➤ **Visi**

Visi merupakan gambaran cara pandang kedepan untuk menentukan arah tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna terhadap apa yang akan dicapai. Adapun Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna di sejalankan dengan visi Kabupaten Natuna :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural.

Sedangkan Visi terbaru Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025 – 2029 adalah :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmus, Berdaya Saing dan Berbudaya.

➤ **MISI**

Berdasarkan telaahan dari visi dan misi Kabupaten Natuna yang disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai peranan penting khususnya untuk mendukung misi ke 2 yaitu :

Misi II : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal.

Sedangkan Misi terbaru Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025 – 2029 adalah untuk mendukung misi ke I :

Misi I : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan

2.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Sebagai penjabaran untuk mendukung misi diatas, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna telah menetapkan Tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 sebagai berikut:

- Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan
- Indikator : 1. Indek Ketahanan Pangan
2. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pelayanan publik
- Indikator : 1. Indek Ketahanan Pangan
2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian berdasarkan RPJMD tahun 2025 – 2029 mengalami perubahan, dimana berdasarkan RPJMD 2025 – 2029 menekankan pada peningkatan produktifitas pertanian dan ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya dan tata kelola pemerintah yang secara akuntabel dan berorentasi pelayanan public.

3. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna menjabarkan kedalam rensta

2021-2026 adalah sebagai berikut :

➤ Sasaran 1 : Meningkatkan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri

✓ Indikator : Persentase Ketersediaan Pangan

➤ Sasaran 2 : Meningkatkan Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan

✓ Indikator : Produksi Sektor Pertanian

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan RPJMD tahun 2025 – 2029 adalah :

➤ Sasaran 1 : Meningkatkan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri

✓ Indikator : Persentase Ketersediaan Pangan

➤ Sasaran 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan

✓ Indikator : Produksi Pertanian

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun 2025 – 2029 mengalami sedikit perubahan yaitu pada sasaran ke 2 dan indikatornya, dimana sasaran ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan perkebunan.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat yang diembankan seperti uraian dibawah ini :

Tabel 2.3.1 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Pangan	$(\text{Jumlah Cadangan Pangan} / \text{Jumlah Kebutuhan}) \times 100 \%$	Bidang Ketahanan Pangan
2.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan	Produksi Sektor Pertanian	Hasil Produksi pertanian yang dihasilkan dalam satu tahun	Bidang Pertanian

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator kinerja utama merupakan suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja ini disusun dengan memperhatikan

dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuann	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	34,13
2.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian/ Perkebunan	Produksi Sektor Pertanian	Ton	157.123

Selanjutnya, sasaran strategis beserta indikator utama diuraikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran.

Tabel 2.4.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1	Persentase Ketersediaan Pangan	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Derah Kabupaten / Kota	1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
.			2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota	1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam (satu) Daerah Kabupaten / Kota
			3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Wilayah Kabupaten / Kota
					2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan	1	Produksi Sektor Pertanian	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			2	Program Penyediaan Dan Pengembangan	1	Pengembangan Prasarana Pertanian	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

				Prasana Pertanian				
							2	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B
					2	Pembangunan Prasarana Pertanian	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
			3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Penjaminan Kesehatan hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	1	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis Pada Hewan
			4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			5	Program Penyuluhan Pertanian	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa
							2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3	Nilai LAKIP	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	4	Indek Kepuasan Masyarakat	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Peralatn dan Perlengkapan Kantor

						2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
						4	Penyediaan Bahan/Material
						5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan pelaksanaan program dan kegiatan merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas dimana pelaksanaan program dan kegiatan ini akan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan pendanaan yang tersedia yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar dapat mencapai tujuan organisasi dan selaras visi dan misi Kabupaten Natuna.

Berdasarkan pengesahan APBD Natuna tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.405.305.966,- selanjutnya dengan adanya beberapa penyesuaian anggaran dan disahkannya APBD Perubahan tahun 2025, terjadi perubahan besaran alokasi yaitu menjadi sebesar Rp. 14.212.610.070,- atau berkurang 18,34 %. Berikut Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025.

Tabel 2.4.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.

NO	URAIAN		PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN
(1)	(2)			(3)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.578.798.950	10.870.584.054
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	266.000
	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	266.000
	2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.360.805.000	9.749.148.771
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.360.805.000	9.749.148.771
	3	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	522.328.000	357.828.883
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.200.000	234.700.000
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.000.000	6.151.600
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.981.000	-
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	20.585.700
	4	Penyediaan Bahan/Material	25.072.000	30.785.300
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.075.000	65.606.283
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.500.000	38.425.000
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.500.000	38.425.000
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.862.950	537.268.388
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	6.051.938
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.630.000	22.630.000

	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	811.232.950	508.586.450
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.003.000	187.647.012
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.003.000	162.445.000
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.000.000	13.425.000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	11.777.012
2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	-	14.161.996
	1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	14.161.996
	1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	-	14.161.996
3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	326.935.000	98.764.150
	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	165.885.000	84.256.750
	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	165.885.000	84.256.750
	2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	161.050.000	14.507.400
	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	161.050.000	14.507.400
4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	301.963.016	304.124.369
	1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota	301.963.016	304.124.369
	1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	301.963.016	304.124.369
5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	24.240.000	12.300.000
	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	24.240.000	12.300.000
	1	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	24.240.000	12.300.000

6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		2.392.686.000	1.545.981.932
	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.192.686.000	1.545.981.932
	1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.192.686.000	1.545.981.932
	2	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yan Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	-
	1	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	200.000.000	-
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		975.000.000	1.067.235.489
	1	Pengembangan Prasarana Pertanian	130.000.000	223.236.801
	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	130.000.000	223.236.801
	2	Pembangunan Prasarana Pertanian	845.000.000	843.998.688
	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	845.000.000	843.998.688
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		130.000.000	145.129.390
	1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah	130.000.000	145.129.390
	1	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	130.000.000	145.129.390
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		230.000.000	31.128.500
	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	230.000.000	31.128.500
	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	230.000.000	31.128.500
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		82.983.000	123.200.190
	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	82.983.000	123.200.190
	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	82.983.000	108.208.000

	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	-	14.992.190
JUMLAH			17.405.305.966	14.212.610.070

Tabel 2.4.4 Tabel Anggaran Pendukung Indikator Utama

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Pangan	429.350.515
2.		Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan	Produksi Sektor Pertanian	2.912.675.501
Jumlah				3.342.026.016

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah anggaran pendukung Indikator Utama sebesar Rp. 3.342.026.016,- dengan alokasi anggaran untuk meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri sebesar Rp. 2.912.675.501,- dan alokasi untuk meningkatkan ekonomi sektor pertanian / Perkebunan sebesar Rp. 429.350.515.

a) Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Persentase ketersediaan pangan diketahui dengan menghitung jumlah cadangan pangan yang beredar dibagi dengan jumlah kebutuhan pangan dan dikali 100 %. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis khususnya di daerah di indikasikan dengan ketersediaan bahan pangan yang beredar baik ketersediaan dari intervensi pemerintah daerah, Bulog, pihak swasta serta dari hasil produksi pertanian yang ada.

b) Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan

Ekonomi sektor pertanian adalah seluruh aktifitas pertanian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu hasil produk pertanian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Indikator meningkatnya ekonomi sektor pertanian/perkebunan, salah satunya ditunjukkan dengan adanya peningkatan produksi komoditi pertanian dan perkebunan yaitu komoditi tanaman pangan, komoditi tanaman hortikultura, komoditi peternakan dan komoditi perkebunan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan pelaksanaan program dan kegiatan merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas dimana pelaksanaan program dan kegiatan ini akan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan pendanaan yang tersedia yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar dapat mencapai tujuan organisasi dan selaras dengan visi dan misi Kabupaten Natuna

2.5. Kebijakan

Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna untuk mencapai Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Pengembangan dan Penguatan potensi Pertanian	Peningkatan produktivitas sektor pertanian
	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan		

2.6. Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan Program, Kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakn, Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian menetapkan indikator kinerja beserta targetnya sebagai tolak ukur keberhasilannya.

Tabel 2.6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
MENINGKATKAN KETERSEDIAAN PANGAN STRATEGIS DALAM NEGERI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Intervensi CPM	Persen	5
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persen	86,67
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	13
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kcal/kap/hr	2400
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan	CV Ratio	CV Ratio	10
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumsi Wilayah Kabupaten / Kota	Informasi Harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten / kota	Laporan	1
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kcal/kap/hr	2100
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Gram/Kapita/Hari	57
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Penganekaragaman	Laporan	7

		Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PREVALENCE PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT	Nilai	3,03
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	Persen	10
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3,55
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Yang Aman	Persen	90
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi	Sampel	60
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1
MENINGKTKAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN / PERKEBUNAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Persen	10

	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	Unit	25
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	0,75
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	1,48
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B	Ha	30
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	42
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan produksi dan atau jalan usaha tani	KM	2.562,4
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	PERSEN	1

	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	Persen	1
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah yang dilakukan survailans dan zoonosis pada hewan	Wilayah	4
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE LAHAN YANG DIKENDALIKAN/DITANGGULANG	PERSEN	1
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Area Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	4
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Area Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	1
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DAN KELEMBAGAAN PETANI	Persen	0,45
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Dibina	Persen	15
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan	Unit	1

		Kapasitasnya		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	7,0

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*performanceimprovement*).

Maka untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025, pendekatannya dilakukan berdasarkan kegiatan-kegiatan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan kesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi misi dan strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab II tentang rencana

kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2025, telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan sasaran tersebut yang tercakup dalam 1 (satu) program penunjang, 9 (sembilan) program pembangunan, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.212.610.070,- yang terdiri atas anggaran penunjang sebesar Rp. 10.870.584.054,- anggaran pendukung IKU sebesar Rp. 3.342.026.016,-.

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna untuk Tahun 2025 yang mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disajikan berdasar pada rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2021-2026.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (formulir pengukuran kinerja) perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dalam kondisi :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{100\%} \times$$

3.1. Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025, berikut capaian kinerja sasaran strategis diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	34,13	235,58	690,23
2.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	157.123	14,155,81	9,01

SASARAN 1

Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri

Persentase Ketersediaan Pangan

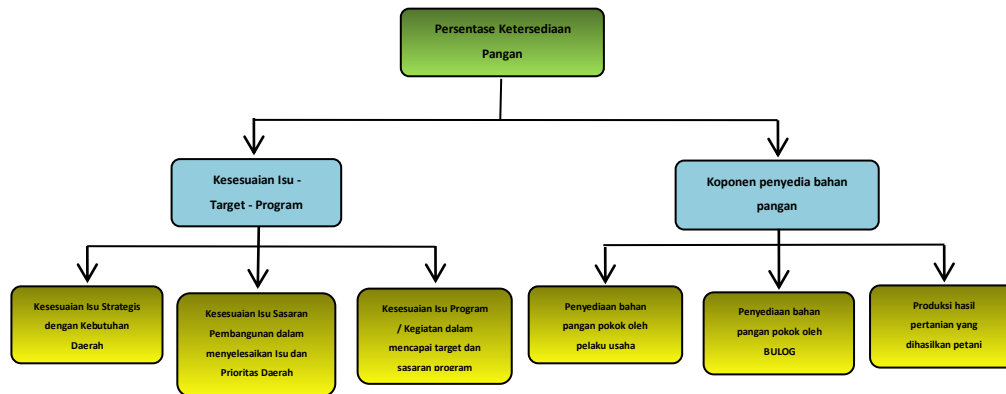
Dalam tabel diatas realisasi kinerja untuk indikator “*Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri*” memiliki target sebesar 34,13 %. Realisasi dari target pada tahun 2025 yaitu sebesar 235,58 % dan capaian sebesar 690,23 %. Hasil ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 157,02 % dengan capaian sebesar 461,14 %.

Metode Pengukuran

Pengukuran Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2025 diperoleh dengan menghitung ketersediaan pangan utama yang beredar baik stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), stok pangan dari bulog, data pangan beredar dari Disperindak serta produksi pertanian selama satu tahun. Komponen pengukuran indikator Persentase Ketersediaan

Pangan Tahun 2025 dapat digambarkan dengan skema gambar sebagai berikut :

Bagan 2. Komponen Pendorong Tecapainya Ketersediaan Pangan



Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran yang dilakukan berdasarkan data ketersediaan cadangan pangan pemerintah (CPP) dan cadangan pangan strategis dalam negeri yang beredar dimasyarakat, persediaan bulog maupun ketersediaan dari hasil produksi yang dihasilkan petani adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah :

Tabel 3.1.2. Hasil Pengukuran Ketersediaan pangan Beredar Kabupaten Natuna Tahun 2025

No.	Komponen Perhitungan	Ketersediaan pangan			
		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah Produksi (Beras)	56,7	Ton	108,22	Ton
2.	Sisa CPP	1,85	Ton	71,078	Ton
3.	CPM	0	Ton	0	Ton
4.	Stok Pangan dari Disperindag (pedagang)	167,43	Ton	109,48	Ton
5.	Stok Pangan Tahunan Bulog	734,50	Ton	994,65	Ton
Total		734,50	Ton	1.283,43	Ton
Jumlah Kebutuhan Pangan		611,7	Ton	544,80	Ton
Persentase Ketersediaan Pangan = Jumlah Cadangan Pangan/Jumlah Kebutuhan Pangan x 100%		157,02	%	235,58	%

Tabel 3.1.3. Hasil Pengukuran Ketersediaan pangan berdasarkan ketersediaan CPP Kabupaten Natuna Tahun 2025

No.	Komponen Perhitungan	Ketersediaan pangan			
		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1.	Sisa CPP + CPPD	4,32	Ton	22,05	Ton
	Total	4,32	Ton	22,05	Ton
	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan = Jumlah Cadangan Pangan/Target Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (berdasarkan perbadan (Bapanas) no. 15 tahun 2023) x 100%	=4,32/75*100=5,76	%	=1,55 + 20,5/75*100=29,4	%

Realisasi indikator sasaran kinerja “*Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri*” tahun 2025 yaitu sebesar 235,58 % dengan capaian sebesar 691,85 %, lebih besar dari realisasi tahun 2024 yaitu 157,02 % dengan capaian sebesar 461,14 %. Untuk realisasi ketersediaan pangan berdasarkan intervensi pemerintah berupa CPP sebesar 29,4 % dengan capaian sebesar 86,14 %. Hasil ini lebih besar dari realisasi tahun 2024 yaitu 5,76 % dengan capaian sebesar 16,91 %.

SASARAN 2

Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan

Produksi Sektor Pertanian

Dapat dilihat pada tabel dibawah, indikator “*Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan*” memiliki target sebesar 157.123 Ton, dengan Realisasi dari target pada tahun 2025 yaitu sebesar 14.155.81 dan capaian sebesar 9,01 %.

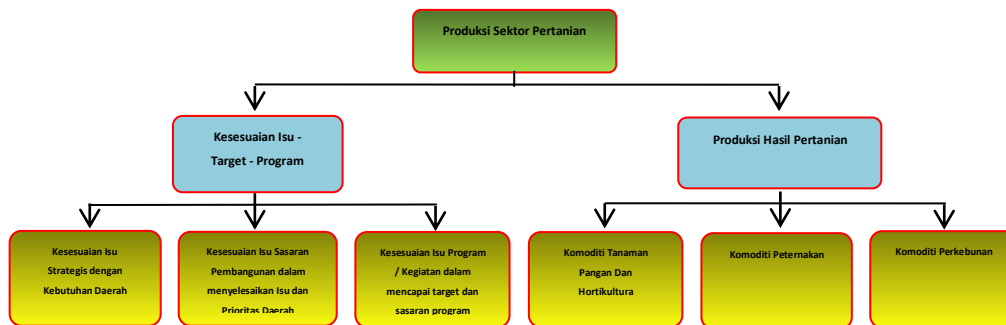
Tabel 3.1.4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan	Produksi Sektor Pertanian	Ton	157.123	14.155,81	9,01

Metode Pengukuran

Pengukuran Produksi Sektor Pertanian tahun 2025 diperoleh dengan menghitung jumlah produksi pertanian baik, tanaman pangan, hortikultura, produksi ternak maupun produksi perkebunan selama satu tahun dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komponen pengukuran indikator Persentase Ketersediaan Pangan Tahun 2025 dapat digambarkan dengan skema gambar sebagai berikut :

Bagan 3. Komponen Pendorong Tercapainya Produksi Sektor Pertanian



Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran yang dilakukan berdasarkan data ketersediaan pangan

Untuk realisasi Indikator pada Sasaran II “*Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan*” dengan Indikator penilaian, jumlah “Produksi Sektor Pertanian” yang dihasilkan dalam satu tahun. Realisasi capaian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 14.155,81 Ton dengan capaian 9,01 %, lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 157.123 Ton. Hasil ini lebih besar dari realisasi tahun 2024 sebesar 11.160,91 Ton dengan capaian sebesar 7,46 %.

Tidak tercapainya realisasi pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa penyebab yang tidak jauh dengan tahun sebelumnya antara lain, luas tanam komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta sebagian tanaman perkebunan yang menurun secara signifikan, Umur sebagian besar tanaman perkebunan seperti karet dan cengkeh yang sudah tua sehingga produktifitas turun secara

signifikan serta tidak berproduksi, banyaknya tanaman perkebunan seperti cengkeh dan karet yang mati / rusak karena tidak dirawat akibat tidak ekonomis harga jual produknya. Kondisi tersebut terutama terkait dengan ongkos produksi yang tinggi menyangkut ketersediaan sarana produksi seperti pupuk dan obat – obatan, ongkos pengolahan lahan, perawatan/pemeliharaan dan pengendalian penyakitnya tanaman. Selain itu rendahnya nilai jual hasil produk pertanian menyebabkan kurangnya minat petani untuk memperluas lahan pertaniannya. Dari sektor peternakan cukup berpengaruh signifikan terhadap rendahnya realisasi produksi mengingat terjadinya penurunan pengeluaran ternak keluar daerah, rendahnya produktifitas ternak khususnya ternak sapi akibat menurunnya kualitas genetik ternak karena terjadinya perkawinan sedarah (inbreeding).

Berikut data komponen pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya sasaran ke dua “*Meningkatnya ekonomi sektor pertanian/perkebunan*” tahun 2024 – 2025 :

Tabel 3.1.5. Produksi Tanaman Pangan (Padi) Tahun 2024 – 2025.

No.	Komoditas	Tahun 2024		Tahun 2025		Keterangan
		Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)	
1.	Padi	112,68	2,25	219,69	2,68	
JUMLAH		112,68	2,25	219,69	2,68	

Tabel 3.1.6. Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2024 – 2025

No.	Komoditas	Tahun		Keterangan
		2024	2025	
1.	Padi	112,68	219,69	
2.	Jagung	112,68	323,59	
3.	Ubi Kayu	611,63	863,46	
4.	Ubi Jalar	169,1	190,07	
5.	Kacang Tanah	9,02	24,16	
JUMLAH		1.043,25	1.620,96	

Tabel 3.1.7. Produksi Hortikultura (Ton) Tahun 2024 – 2025.

No.	Komoditas	Tahun		Keterangan
		2024	2025	
1.	Bawang Daun	6,07	18,95	
2.	Bawang Merah	1,15	-	
3.	Petsai/Sawi	10,53	34,11	
4.	Bayam	2,70	12,61	
5.	Buncis	0,40	15,60	
6.	Cabai Besar	1,8	-	
7.	Cabai Keriting	60,40	141,38	
8.	Cabai Rawit	63,58	195,81	
9.	Kacang Panjang	37,01	73,29	
10.	Kangkung	15,03	44,02	
11.	Mentimun	70,54	310,08	
12.	Labu Siam	0,02	-	
13.	Terung	27,72	149,27	
14.	Tomat	12,30	48,55	
15.	Melon	-	11,25	
16.	Semangka	76,92	561,47	
JUMLAH		470,8	1.616.39	

Tabel 3.1.8 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2024 – 2025

No.	Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)		Keterangan
		2024	2025	
1.	Cengkeh	1.839	6.573	
2.	Kelapa	6.500	1.301	
3.	Karet	1.015	2.201	
Jumlah		9.354	10.075	

Tabel 3.1.9 Produksi Daging dan Telur Tahun 2024 – 2025

No.	Komoditas	Produksi Daging dan Telur (Ton)		Keterangan
		2024	2025	
1.	Sapi	79,836	66,49	
2.	Kambing	0,616	-	
3.	Ayam Buras	15,194	10,37	
4.	Ayam Pedaging	441,990	484,99	
5.	Telur Ayam	147,955	281,61	
6.	Telur Itik	0,589	-	
Jumlah		627,40	843,46	

Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja khususnya pada indikator Produksi Sektor Pertanian tidak dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, hal ini tidak lepas dari faktor rendahnya nilai jual produk pertanian di Kabupaten Natuna sehingga menyebabkan kurangnya animo petani untuk mengembangkan atau sekedar untuk mengelola lahan pertanian/kebunnya secara maksimal yang pada akhirnya menyebabkan produksi rendah bahkan tidak berproduksi. Kurangnya dukungan anggaran dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 sebagai akibat terjadinya reconfusing anggaran turut berpengaruh terhadap penyediaan sarana dan prasarana produksi yang diperlukan petani. Berikut Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Tahun 2025 :

3.2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir.

Untuk melihat sejauhmana capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu adanya perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, adapun capaian kinerja sasaran dari tahun 2022 - 2025 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 - 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	127,90	87,68	157,02	235,58
2.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	6.525,66	7.904,00	11.160,91	14.155,81

Berdasarkan tabel diatas, Persentase ketersediaan pangan tahun 2025 terealisasi sebesar 235,58 % lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 34,13 %, besarnya realisasi tersebut disebabkan komponen perhitungan menggunakan komponen ketersediaan pangan utama yang beredar baik dari produksi, Bulog, Disperindak maupun intervensi pemerintah daerah melalui CPP Daerah. Sedangkan ketersediaan pangan berdasarkan intervensi pemerintah yaitu ketersediaan CCP Daerah sebagai bentuk intervensi keamanan pangan tanpa memasukkan komponen ketersediaan yang beredar, realisasi ketersediaan pangan sebesar 159,76 %. Untuk produksi sektor pertanian terealisasi sebesar 14.155,81 ton, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 11.160,91 Ton.

Capaian Indikator Kinerja terhadap target akhir Renstra untuk masing - masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	34,13	235,58	690,23	34,21
2.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	157.123	14.155,81	9,01	164.980

Tabel 3.2.3. Realisasi Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
MENINGKATKAN KETERSEDIAAN PANGAN STRATEGIS DALAM NEGERI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Intervensi CPM	Persen	5	0
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persen	86,67	0
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	13	0
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kcal/kap/hr	2400	2402
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan	CV Ratio	CV Ratio	10	6,78
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumsi Wilayah Kabupaten / Kota	Informasi Harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten / kota	Laporan	1	1
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kcal/kap/hr	2100	2080
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Gram/Kapita /Hari	57	65,2
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	Laporan	7	7

		Sumber Daya Lokal			
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PREVALENCE PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT	Nilai	3,03	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	Persen	10	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3,55	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Yang Aman	Persen	90	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi	Sampel	60	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	
MENINGKTKAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN / PERKEBUNAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Persen	10	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	Unit	25	

	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	0,75	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	1,48	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B	Ha	30	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	42	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan produksi dan atau jalan usaha tani	KM	2.562,4	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	PERSEN	1	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	Persen	1	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah yang dilakukan survailans dan	Wilayah	4	

		zoonosis pada hewan			
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE LAHAN YANG DIKENDALIKAN/DITANGGULANG	PERSEN	1	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Area Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	4	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Area Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	1	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DAN KELEMBAGAAN PETANI	Persen	0,45	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Dibina	Persen	15	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	7,0	

3.3. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Pada tahun 2025 terdapat delapan program yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama dengan total anggaran sebesar Rp 2.536.488.060,- pada indikator Indeks ketersediaan pangan strategis dalam negeri sebesar Rp. 511.026.500,- didukung dengan tiga program, sedangkan untuk indikator produksi pertanian sebesar 2.025.461.560,- dengan lima program.

Secara umum pemanfaatan anggaran dimasih-masing program untuk mendukung pencapaian indikator tersebut belum dapat mengungkit secara signifikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

3.4. Analisis Keuangan

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna telah melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan kegiatan dan program per sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)			(3)			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	10.870.584.054	10.562.211.818	97,16	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah				
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	266.000	266.000	100	
	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	266.000	266.000	100	
	2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.749.148.771	9.554.756.482	98,01	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9.749.148.771	9.554.756.482	98,01	
	3	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	357.828.883	333.172.447	93,11	
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	234.700.000	221.700.000	94,46	
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6.151.600	6.151.600	100	
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20.585.700	20.498.130	99,57	
	4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30.785.300	28.561.336	92,78	
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.606.283	56.261.381	85,76	
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan	38.425.000	33.000.000	85,88	
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38.425.000	33.000.000	85,88	

	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	537.268.388	474.852.169	88,38	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.051.938	5.700.000	94,18	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	22.630.000	13.918.500	61,50	
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	508.586.450	455.233.669	89,51	
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	187.647.012	166.164.720	88,55	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	162.445.000	141.485.902	87,10	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13.425.000	12.901.806	96,10	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11.777.012	11.777.012	100	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase Intervensi CPM	14.161.996	14.161.996	100	
	1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	14.161.996	14.161.996	100	
	1	Peyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandiran Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	14.161.996	14.161.996	100	
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	98.764.150	86.546.682	87,63	
	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	CV Ratio	84.256.750	72.122.397	85,60	
	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten / kota	84.256.750	72.122.397	85,60	
	2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	14.507.400	14.424.285	99,43	
	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	14.507.400	14.424.285	99,43	

4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		PREVALENCE PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT	304.124.369	271.085.248	89,14	
	1	Penanganan Kerwanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	304.124.369	271.085.248	89,14	
	1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	304.124.369	271.085.248	89,14	
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pangan Segar Yang Aman	12.300.000	12.299.100	99,99	
	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi	12.300.000	12.299.100	99,99	
	1	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12.300.000	12.299.100	99,99	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	1.545.981.932	1.531.165.357	99,04	
	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	1.545.981.932	1.531.165.357	99,04	
	1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.545.981.932	1.531.165.357	99,04	
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	1.067.235.489	616.455.387	57,76	
	1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B	223.236.801	217.267.982	97,33	
	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	223.236.801	217.267.982	97,33	
	2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan produksi dan atau jalan usaha tani	843.998.688	399.187.405	47,30	
	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	843.998.688	399.187.405	47,30	
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	145.129.390	139.810.177	96,33	

	1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	145.129.390	96,33	96,33	
	1	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan survailans dan zoonosis pada hewan	145.129.390	139.810.177	96,33	
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		PERSENTASE LAHAN YANG DIKENDALIKAN/DITANGGULANG	31.128.500	30.952.380	99,43	
	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Area Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	31.128.500	30.952.380	99,43	
	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Area Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	31.128.500	30.952.380	99,43	
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		PERSENTASE PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DAN KELEMBAGAAN PETANI	123.200.190	94.939.010	77,06	
	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Dibina	123.200.190	94.939.010	77,06	
	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	108.208.000	79.946.820	73,88	
	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14.992.190	14.992.190	100	
JUMLAH				14.212.610.070	13.359.627.155	94,00	

Realisasi Capaian Indikator Kinerja anggaran terealisasi sebesar 94,00 %, tingginya realisasi ini mencerminkan bahwa pemanfaatan anggaran sudah cukup baik karena penyerapan anggaran sudah mendekati capaian yang maksimal. Selain itu, pada tahun anggaran 2025 alokasi anggaran sebagian digunakan untuk membayar belanja yang terutang tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.638.606.877 yang terdiri atas belanja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 856.731.878, pendukung IKU Rp. 781.874.999.

Tabel 3.4.2. Realisasi Penyerapan Anggaran Pendukung IKU

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Anggaran		
				Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Pangan	429.350.515	384.093.026	89,46
2.		Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan	Produksi Sektor Pertanian	2.912.675.501	2.413.322.311	82,86
JUMLAH				3.342.026.016	2.797.514.337	83,70

Dari tabel 18, dana pendukung IKU untuk capaian kinerja anggaran sebesar Rp. 3.342.026.016,- dengan realisasi Rp. 2.797.514.337 (83,70 %) sehingga in efisiensi anggaran pendukung IKU mencapai 16,30 %. Tingginya in efisiensi anggaran pendukung IKU terjadi akibat kekosongan kas daerah sebagai dampak tunda salur keuangan dari pusat.

Akuntabilitas Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan akuntabilitas penyerapan anggaran Tahun 2025 dapat dijelaskan dari jumlah belanja Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp. 10.870.584.054,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 10,562.211.818,- atau sebesar 97,16 %.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja pada indikator Indeks Persentase ketersediaan pangan, beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator kinerja diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pada indikator ketersediaan pangan strategis dalam negeri, ketersediaan pangan yang berasal dari swasta terjadi peningkatan dari tahun ketahun seiring peningkatan jumlah penduduk dan jumlah permintaan, selain itu dengan terlaksananya intervensi pemerintah daerah melalui pengadaan CPP turun mendukung terjadinya peningkatan ketersediaan pangan.
2. Pada indikator produksi sektor pertanian, masih rendahnya produksi disebabkan oleh beberapa faktor sesuai komoditinya antara lain adalah :

1. Komoditi perkebunan.

Umur sebagian besar tanaman tanaman perkebunan sudah memasuki masa tua sehingga produktifitas rendah / tidak memproduksi dan (belum diremajakan), berkurangnya jumlah tanaman dan berkurangnya luas tanam. Selain itu nilai hasil jual juga berperan menjadi penyebab semakin rendahnya produksi karena perawatan tanam yang tidak maksimal.

2. Komoditi pangan dan hortikultura

Untuk komoditi pangan dan hortikultura, nilai jual produk pertanian tidak maksimal, ongkos produksi tinggi yang menyebabkan tidak tercapainya luas tanam. Kondisi ini menyebabkan produksi turun. Hal ini menyebabkan minat bertani semakin menurun yang pada akhirnya turun andil

menjadi factor semakin turunnya produksi pertanian secara signifikan.

3. Sektor Peternakan

Rendahnya produksi ternak disebabkan berkurangnya permintaan sapi dari daerah lain serta produktifitas ternak yang menurun akibat semakin menurunnya genetika ternak akibat inbreeding.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan bupati Natuna no 66 tahun 2023 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*Result Oriented Government*).

4.1. Kesimpulan

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2025 untuk indikator kinerja pertama yaitu “Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri” sebesar 235,58 % dengan capaian sebesar 690,23 % lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 34,13 %. Ketersediaan tersebut merupakan seluruh persediaan baik dari bulog, swasta (pedagang) maupun dari produksi pangan yang dihasilkan. Untuk realisasi ketersediaan pangan berdasarkan intervensi pemerintah berupa CPP sebesar 29,4 % dengan capaian sebesar 86,14 %. Hasil ini lebih besar dari realisasi tahun 2024 yaitu 5,76 % dengan capaian sebesar 16,91 %.

Sedangkan Untuk realisasi indikator ke 2 yaitu “Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan” sebesar 14.155,81 Ton dengan capaian 9,01 %, lebih kecil dari dari target yang ditetapkan sebesar 157.123 Ton. Hasil ini lebih besar dari realisasi tahun 2024 sebesar 11.160,91 Ton dengan capaian sebesar 7,46 %. Rendahnya capaian target tersebut disebabkan produktifitas tanaman khususnya tanaman perkebunan sangat

rendah akibat kondisi sebagian besar tanaman merupakan tanaman tua yang perlu peremajaan kembali. Selain itu dari sektor peternakan, permintaan ternak sapi dari daerah lain sangat berkurang. Pada komoditi tanaman pangan dan hortikultura, luas tanam yang semakin menurun menjadi faktor terjadinya penurunan jumlah produksi secara signifikan.

Adapun anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna sebesar Rp. 14.212.610.070,- dimana alokasi untuk mendukung indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp. 3.342.026.016,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.797.415.337,- (83,70 %) dan anggaran pendukung sebesar Rp. 10.870.584.054,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.562.211.818,- (97,16 %), Efisiensi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tahun 2025 sebesar 6,00 %, persentase ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah anggaran yang tersedia dengan realisasi anggaran. Sedangkan in-efisiensi anggaran pendukung IKU mencapai 16,30 %. Tingginya in-efisiensi penyerapan anggaran pendukung anggaran IKU disebabkan tidak dapat dibayarnya belanja kegiatan akibat kekosongan kas daerah akibat terjadinya tunda salur anggaran dari pemerintah pusat. Selain itu kekosongan kas daerah juga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan

4.2. Strategi

Agar pelaksanaan kegiatan terlaksana dan target tercapai sesuai visi dan misi RPJMD Kabupaten Natuna, maka in-efisiensi serapan anggaran IKU harus diminimalisir dengan menerapkan disiplin anggaran sesuai time schedule yang telah ditetapkan sehingga meminimalkan terjadinya gagal bayar di akhir tahun anggaran.

Selain itu, komitmen juga berperan dalam menentukan berhasil tidaknya sasaran kinerja yang telah ditetapkan, komitmen

ini diwujudkan dalam bentuk dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala OPD dan Kepala daerah dan didukung oleh beberapa OPD lainnya yang ada keterkaitannya dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dibuat untuk memberikan suatu gambaran jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Natuna,



WAN SYAZALI, SKM
NIP. 19760507 200502 1 007